



P E N E T A P A N

Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK 3205194404860001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Ciwatin 1 RT.014 RW.010 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3985/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 04 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

Halaman 1 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 4 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama **XXXXX(Almarhum)** akan tetapi suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **21 Juni 2022** yang tercantum dalam surat keterangan kematian dengan Nomor : 474.3/01/VI/DES/2022;
2. Bahwa anak kandung pemohon yang merupakan hasil dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon **XXXXX(Almarhum)** yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, yang bernama:
XXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Garut, 04 Desember 2006 (17 tahun 9 bulan), Alamat : Kampung Ciwatin 1 RT.014 RW.010 Desa Cibongas Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, ;
Akan menikah dengan calon Suaminya :
XXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 05 April 2004, Nomor Identitas: 3206050504040001, Alamat : Kampung Pakemitan RT.007 RW.004 Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SD,;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun (17 tahun 9 bulan) dan atau kurang 1 tahun 3 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah

Halaman 2 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya berstatus Jejak Dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan telah memperoleh penghasilan Rp..800.000 (delapan ratus ribu rupiah) /bulan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung Pemohon bernama : **XXXXX BINTI XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama : **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada perubahan ataupun perbaikan ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama XXXXX, dan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Desember 2006 (berumur 04 Desember 2006 (17 tahun 9 bulan);
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama lebih dari lebih satu tahun dan anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi dan ingin segera untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang di larang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa benar Pemohon telah telah menyetujui pernikahan tersebut dan telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 5 April 2004 (sekarang berumur 20 tahun 5 bulan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sudah cukup lama lebih satu tahun, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya ingin segera untuk menikah;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan sudah merencanakan untuk segera menikah;
- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp. 800.000,- perbulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama XXXXX;

- Bahwa yang bersangkutan adalah benar orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar yang bersangkutan telah mengetahui rencana pernikahan anaknya;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Pemohon dan anaknya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bersangkutan telah melamar anak Pemohon dan bermaksud segera untuk menikah;
- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya untuk mencatatkan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan menikah oleh aturan perundang-undangan;
- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir kalau anaknya tidak segera untuk dinikahkan karena hubungan anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan sering bertemu sehingga sangat khawatir terus akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa yang bersangkutan setuju anaknya untuk segera dinikahkan dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga mereka;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 800.000,- perbulan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan juga tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon Nomor : 474.3/01/VI/DES/2022, tanggal 2 Juni 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

Halaman 6 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi keterangan sehat dari tenaga kesehatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi keterangan penghasilan calon suami anak Pemohon dari kepala desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya,, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mohon diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan untuk meminta dispensasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, alat-alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan

Halaman 8 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1, P.3 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan bukti sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2, P-6 sampai dengan P-8 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut merupakan bagian dasar alasan dapat mengajukanya permohonan dispensasi kawin dan telah dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang lainnya, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah yuridiksi Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon Nomor : 474.3/01/VI/DES/2022, tanggal 2 Juni 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya) telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2009 pasal 6 ayat 3, hakim memandang cukup yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sebagai Ibu kandung anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi tersebut adalah sebagai Ibu kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon) telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 Desember 2006 (umur 04 Desember 2006 (17 tahun 9 bulan)) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon) telah terbukti bahwa calon

Halaman 9 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya 5 April 2004 (umur 20 tahun 5 bulan) hingga dijatuhkannya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Penolakan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena kurangnya persyaratan yaitu usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia dibolehkannya menikah menurut ketentuan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Fotokopi keterangan sehat) telah terbukti bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi surat keterangan dari kepala desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimuka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, serta berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon telah berhubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX sudah cukup lama kurang lebih satu tahun;
2. Bahwa anak Pemohon lahir 4 Desember 2006 (04 Desember 2006 (17 tahun 9 bulan));

Halaman 10 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon suami anak Pemohon lahir 5 April 2004 (20 tahun 5 bulan) sudah memenuhi aturan secara hukum dibolehkannya melakukan pernikahan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat, sehingga menurut pengakuan mereka sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan bermaksud untuk segera melakukan perkawinan dan telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai tersebut telah menyetujui untuk segera dilangsungkannya pernikahan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga calon mempelai tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai calon suami dan isteri ;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi calon isterinya;
9. Bahwa anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;
10. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan secara syar'î ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sesuai dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidho) antara pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, guna terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan bagi calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikis, diantaranya calon kedua mempelai harus sudah berusia dewasa, oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan batas usia minimal baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan berusia 19 tahun, sehingga seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia tersebut belum dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta di persidangan, Hakim menemukan dua hal kemadharotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak segera untuk dilaksanakannya pernikahan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sangat sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga menurut pengakuan calon

Halaman 12 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dimungkinkan pula sangat tidak baik menurut penilaian lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadlarotan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kotsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Halaman 13 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX BINTI XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.235.000,- (duaratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Usman Parid, S.H., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan bantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya.

Halaman 14 Penetapan Nomor 639/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Hakim Tunggal,

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	235.000,-
--------	---	-----	-----------

(duaratus tiga puluh lima ribu rupiah).